

TESIS

EFEK MODERASI KOMITMEN PIMPINAN PADA PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS SISTEM INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN PULAU TALIABU

*Moderating Effect of Leadership Commitment on the
Relationship between Human Resource Competence,
Information System Quality, and Effectiveness of Local
Assets Management in Pulau Taliabu District*

DAHLAN ETLEGAR
A042221010



PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

TESIS

EFEK MODERASI KOMITMEN PIMPINAN PADA PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS SISTEM INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN PULAU TALIABU

sebagai persyaratan memperoleh gelar MAGISTER Keuangan Daerah

disusun dan diajukan oleh

DAHLAN ETLEGAR

A042221010



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

EFEK MODERASI KOMITMEN PIMPINAN PADA PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS SISTEM INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN PULAU TALIBU

Disusun dan diajukan oleh

DAHLAN ETLEGAR
A042221010

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
tanggal 18 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Ketua



Dr. Sri Sundari, SE., Ak., M.Si
NIP. 196602201994122001

Anggota



Dr. Wahda, SE., M.Pd., M.Si
NIP. 197602082003122001

Ketua Program Studi Magister
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin



Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si
NIP. 197209212006042001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 196402051988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dahlan Etlegar

NIM : A042221010

Program Studi : **Magister Keuangan Daerah (S2)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis

yang berjudul : **Efek Moderasi Komitmen Pimpinan Pada Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Sistem Informasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Pulau Taliabu**

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Januari 2024

Yang menyatakan,



Dahlan Etlegar

PRAKATA



Salam Sejahtera

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan nikmat dan rahmat yang berlimpah sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Efek Moderasi Komitmen Pimpinan pada Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Pulau Taliabu”**.

Proses penyelesaian tesis ini telah banyak melibatkan pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat serta saran yang sangat berarti kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidaklah mudah, ada beberapa hambatan dan cobaan yang harus dilalui oleh peneliti, peneliti yakin segala hambatan dan cobaan yang dilalui akan membentuk karakter yang jauh lebih baik bagi peneliti. Penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa mendapat dukungan dari orang-orang di sekeliling peneliti dan pihak-pihak yang turut membantu. Peneliti telah banyak mendapat dukungan baik itu material dan moril, oleh karena itu melalui kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Orang tua peneliti, Ibu Wapudu Etlegar. Terima kasih atas dukungan, bantuan dan doa yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Serta istri tercinta Sakina Abdul Rahman, SE. dan anak-anak (Aquilaria N. Etlegar & Alana Swietenia Etlegar) atas dukungan dan doanya sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Aliong Mus, ST., selaku Bupati dan Bapak Dr. Salim Ganiru selaku Sekretaris Daerah Pulau Taliabu yang memberikan izin dan

dukungan kepada peneliti untuk melanjutkan studi Program Magister Keuangan Daerah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Dr. Ratna Sari Dewi, SE., M.Si. selaku ketua Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Ibu Dr. Sri Sundari, SE., Ak., M.Si. selaku Pembimbing 1 dan Ibu Dr. Wahda, SE., M.Pd., M.Si. selaku pembimbing 2. Terima kasih atas bimbingan dan saran yang telah diberikan kepada peneliti.
7. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si., Bapak Prof. Dr. Asri Usman, SE., Ak., M.Si., CA. dan Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA. selaku dosen penguji. Terima kasih atas masukan dan nasehat yang telah diberikan selama penyusunan penelitian ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membagi ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama menjalani masa perkuliahan, terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan didikannya.
9. Bapak dan Ibu Pegawai lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Pak Abdul Haris dan pegawai lainnya yang tidak peneliti sebutkan.

10. Bapak Muh. Ridwan Azis, SE., ME. selaku Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
11. Segenap rekan kerja, Bapak Ruslan Dumba, S.Pi. dan Ibu Nuril Kurvia, SE, yang sangat membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini.
12. Teman-teman seperjuangan Keuangan Daerah Angkatan 2022: Suci, Risal, Helda, Nelvia dan teman-teman lain yang tidak sempat peneliti sebutkan namanya.
13. Pihak-pihak yang membantu peneliti selama proses peneltian yang tidak sempat disebutkan namanya, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penelitian ini.

Makassar, 22 Januari 2024

Dahlan Etlegar

ABSTRAK

DAHLAN ETLEGAR. *Efek Moderasi Komitmen Pimpinan pada Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Pulau Taliabu* (dibimbing oleh Sri Sundari dan Wahda).

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan kualitas sistem informasi terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Pulau Taliabu dengan komitmen pimpinan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan pentingnya peran kompetensi sumber daya manusia dan kualitas sistem informasi dalam mencapai efektivitas pengelolaan tersebut. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif dengan metode survei menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Sampel ialah pimpinan dan staf yang terlibat dalam pengelolaan BMD di Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 138 orang. Data dianalisis menggunakan Smart PLS 4.0 dengan teknik analisis regresi dan analisis moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan BMD, sedangkan kompetensi kualitas sistem informasi tidak memengaruhi efektivitas pengelolaan BMD. Komitmen pimpinan dapat memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan BMD, namun tidak dapat memperkuat hubungan kualitas sistem informasi terhadap efektivitas pengelolaan BMD. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan BMD di Kabupaten Pulau Taliabu sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi penggunaan sumber daya daerah.

Kata kunci: pengelolaan barang milik daerah, kompetensi sumber daya manusia, kualitas sistem informasi, komitmen pimpinan, Kabupaten Pulau Taliabu



ABSTRACT

DAHLAN ETLEGAR. *The Effect of Leadership Commitment on the Relationship between Human Resource Competence and Information System Quality, and the Effectiveness of Local Assets Management in Pulau Talabu Regency* (supervised by Sri Sundari and Wanda))

With leadership commitment serving as a moderating variable, the aim of this study is to empirically investigate the effects of information system quality and human resource competency on the efficacy of local government asset management in Pulau Talabu Regency. The complexity of managing local government assets and the significance of information system quality and human resource competency for accomplishing efficient management serve as the driving forces behind this study. In this study a survey method with a quantitative approach and a questionnaire for data collection were used to obtain data from 138 executives and employees working in Pulau Taliabu District local government asset management. The data were analyzed using SmartPLS 4.0 through regression and moderation analysis techniques. The findings show that the effectiveness of asset management is positively and significantly affected by human resource competency. Nonetheless, the effectiveness of asset management remains unaffected by the quality of information system. The relationship between information system quality and asset management effectiveness cannot be strengthened by leadership commitment, but leadership commitment can strengthen the effect of human resource competency on the effectiveness of regional asset management in order to improve public services and make the best use of available resources in Pulau Taliabu Regency, so the management policies of local government asset and procedures might be based on the findings of this study.

Keywords: district asset management, human resource competency, Information system quality, leadership commitment, Pulau Talaby Regency



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Kegunaan Penelitian.....	16
1.4.1. Kegunaan Teoretis.....	16
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	16
1.4.3. Kegunaan Kebijakan.....	16
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	17
1.6. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Tinjauan Teoritis.....	19
2.1.1. <i>Stewardship theory</i>	19
2.1.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	25
2.1.3. Efektivitas Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah.....	27
2.1.4. Komitmen Pimpinan.....	30
2.1.5. Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	33
2.1.6. Kualitas Sistem Informasi.....	35
2.2. Tinjauan Empiris.....	37
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	40
3.1. Kerangka Konseptual.....	40
3.2. Hipotesis.....	41

3.2.1.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	42
3.2.2.	Pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	44
3.2.3.	Komitmen Pimpinan sebagai pemoderasi hubungan antara Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	46
BAB IV METODE PENELITIAN		50
4.1.	Rancangan Penelitian	50
4.2.	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	51
4.3.	Populasi dan Sampel	51
4.4.	Jenis dan Sumber Data.....	52
4.5.	Metode Pengumpulan Data	52
4.6.	Definisi Operasional Variabel.....	52
4.6.1.	Efektivitas Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah (Y)	53
4.6.2.	Komitmen Pimpinan (Z).....	54
4.6.3.	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)	55
4.6.4.	Kualitas Sistem Informasi (X_2).....	56
4.7.	Instrumen Penelitian.....	59
4.8.	Teknik Analisis Data.....	59
4.8.1.	Analisis Deskriptif	60
4.8.2.	Analisis <i>Moderating Structural Equation Model</i> (MSEM)	60
4.8.3.	Analisis Persamaan SEM Moderating dengan <i>Partial Least Square</i> (PLS).....	61
4.8.4.	Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	63
4.8.4.1.	<i>Convergent Validity</i>	63
4.8.4.2.	<i>Discriminant Validity</i>	63
4.8.4.3.	<i>Composite Reliability</i>	63
4.8.4.4.	<i>One Order Confirmatory Factor Analysis</i>	63
4.8.5.	Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	66
4.8.6.	Uji Hipotesis.....	68
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		69
5.1.	Analisis Statistik Deskriptif	69
5.1.1.	Statistik Deskriptif Variabel.....	71
5.1.2.	Statistik Deskriptif Variabel Eksogen	72
5.1.3.	Statistik Deskriptif Variabel Mediasi.....	75
5.1.4.	Statistik Deskriptif Variabel Endogen.....	76

5.2. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	78
5.2.1. <i>Convergent Validity</i>	72
5.2.2. <i>Discriminant Validity</i>	73
5.2.3. <i>Composite Reliability</i>	74
5.3. Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	75
5.4. Uji Hipotesis.....	76
5.5. Pembahasan	80
5.5.1. Kompetensi SDM Berpengaruh terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	80
5.5.2. Kualitas Sistem Informasi Tidak Berpengaruh terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	84
5.5.3. Komitmen Pimpinan Memoderasi Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah	87
5.5.4. Komitmen Pimpinan Tidak Memoderasi Pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	89
BAB VI PENUTUP	92
6.1. Kesimpulan.....	92
6.2. Keterbatasan Penelitian	94
6.3. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	104
Lampiran 2. Statistik Deskriptif Data Penelitian.....	108
Lampiran 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	109
Lampiran 4. <i>Outer Loading</i>	111
Lampiran 5. <i>Cross Loading Factor</i>	113
Lampiran 6. <i>R Square/Adjusted R Square</i>	114
Lampiran 7. <i>Construct reliability and validity</i>	115
Lampiran 8. <i>Path Coefficient</i>	115

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2019 - 2022	3
Tabel 4. 1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukuran.....	57
Tabel 5. 1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	69
Tabel 5. 2 Karakteristik Responden	70
Tabel 5. 3 Statistik Deskriptif Variabel Kompetensi SDM	72
Tabel 5. 4 Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Sistem Informasi	73
Tabel 5. 5 Statistik Deskriptif Variabel Komitmen Pimpinan.....	75
Tabel 5. 6 Statistik Deskriptif Variabel Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	76
Tabel 5. 7 Average Variance Extracted (AVE)	73
Tabel 5. 8 Cross Loading Factor	74
Tabel 5. 9 Composite Reliability.....	75
Tabel 5. 10 R-Square (R^2).....	76
Tabel 5. 11 Hasil Uji Hipotesis.....	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual Penelitian	41
Gambar 5. 1 Outer Model Graphical Output.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh keberhasilan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan pengelolaan aset daerah. Aset daerah merupakan elemen penting dalam administrasi pemerintahan dan layanan publik yang harus dikelola secara efektif, efisien, dan transparan dengan akuntabilitas penuh. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 (jo. PP No. 27/2014) Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan aset BMD merupakan kegiatan yang kompleks dan memerlukan penanganan khusus baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pengelolaan BMD harus dilakukan secara profesional dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan secara manajerial, administratif, dan yuridis.

Petunjuk teknis terkait pengelolaan BMD yang mengatur lebih rinci mengenai pengelolaan BMD tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No. 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah yang dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan, pemusnahan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Aset tetap yang termasuk dalam BMD mempunyai peranan yang sangat penting karena memiliki nilai terbesar bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim & Kusufi, 2016: 307). Hal ini menimbulkan tuntutan bagi Pemerintah Daerah agar melaksanakan pengelolaan aset tetap dengan baik sehingga pemanfaatan aset menjadi lebih efektif, efisien, dan memberikan nilai kemanfaatan yang terbaik bagi program pembangunan di daerah (Siregar, 2016: 134).

Realita yang terjadi masih banyak permasalahan dalam pengendalian internal atas pengelolaan aset daerah di Indonesia (Kurniati & Santoso 2017). Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 tahun 2022 menunjukkan bahwa salah satu bukti lemahnya pengendalian atas aset daerah terlihat dari 542 Pemda di seluruh Indonesia, terdapat 1.637 permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang mayoritas terkait dengan pengelolaan aset tetap (BPK RI, 2022: 103). Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah masih kurang optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu sebagai salah satu Kabupaten di Wilayah Provinsi Maluku Utara juga belum mengelola aset tetap dengan baik. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022 ditemukan Mutasi tambah Aset Tetap senilai Rp224,91 miliar tidak dapat ditelusuri dan dijelaskan dokumen sumbernya secara rinci serta Belanja Barang dan Belanja Bunga sebesar Rp108,66 miliar belum dapat dikapitalisasi sebagai penambah saldo per jenis Aset Tetap. Berdasarkan temuan tersebut, BPK menolak untuk memberikan opini jika Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu tidak menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK.

Selain itu, BPK RI perwakilan Provinsi Maluku Utara, memberikan opini yang tidak optimal atas kinerja keuangan Kabupaten Pulau Taliabu selama empat terakhir. Adapun opini tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2019 - 2022

Tahun	Opini Audit Laporan Keuangan
2019	Tidak Memberi Pendapat
2020	Tidak Memberi Pendapat
2021	Wajar Dengan Pengecualian
2022	Wajar Dengan Pengecualian

Sumber: BPK, 2023.

Opini yang diperoleh berdasarkan hasil audit ini mempengaruhi kredibilitas pemerintahan suatu daerah tertentu pada umumnya secara khususnya tidak terkecuali Kabupaten Pulau Taliabu. Perolehan opini yang belum maksimal dalam empat tahun terakhir sejak tahun 2019 hingga 2022 atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau

Taliabu menggambarkan perlunya keseriusan berbenah dengan meninjau kembali dan memperbaiki penyajian Laporan Keuangan sehingga dapat meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut Mardiasmo (2004), prinsip dasar dari keberhasilan proses pengelolaan BMD meliputi tiga hal utama yaitu (1) perencanaan yang tepat; (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif; dan (3) pengawasan (*monitoring*). Pengelolaan BMD adalah satu cara meningkatkan kinerja secara terus menerus pada setiap level perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan BMD dari suatu entitas. Namun, desentralisasi telah membawa tantangan bagi pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang demokratis serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat. Perubahan yang positif ini membutuhkan dukungan dari para staf pemerintah daerah, lembaga legislatif, media lokal, dan masyarakat. Mereka harus terlibat secara aktif mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

Pengelolaan BMD harus dikelola dengan berpatokan pada PP No. 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah/negara dan Permendagri No. 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Peraturan ini mengatur pengelolaan BMD agar lebih transparan, akuntabel dan efektif. Peningkatan kualitas pengelolaan BMD yang profesional transparan, akuntabel, terukur, merupakan sebuah langkah yang harus di ambil untuk

bisa mengedepankan prinsip *Good Government Governance* (Tabita, 2021).

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan (Tabita, 2021). Pertanggungjawaban atas BMD kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan Informasi BMD memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Kemampuan Kabupaten Pulau Taliabu dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK khususnya terkait dengan pengelolaan BMD sehingga dapat meraih opini WTP menjadi hal yang menarik untuk diteliti terkait faktor-faktor pendukung keberhasilan tersebut.

Aset tetap merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pencapaian tujuan yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebagai pengelola sumber daya wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan aset kepada masyarakat sebagai pemilik sumber daya. Hal ini sejalan dengan teori *Stewardship* yang menjelaskan bahwa manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Apabila terjadi perbedaan kepentingan, *steward* akan berusaha bertindak sesuai dengan

keinginan prinsipal karna *steward* berpandangan bahwa usaha yang dilakukannya harus digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah Daerah (*steward*) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern atas aset tetap daerah demi kepentingan masyarakat sebagai pemberi amanah (prinsipal).

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung lainnya. Teori Implementasi Kebijakan Publik (*Edward III, 1980*), menyajikan empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implelementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bertolak dari teori tersebut, keberhasilan kebijakan publik dalam bentuk pengelolaan BMD yang efektif dan efisien membutuhkan sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten. SDM memiliki peran utama dalam setiap kegiatan, termasuk dalam pelaksanaan implementasi kebijakan atau pelayanan publik. Pelaksanaan pemerintahan yang baik terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan dukungan kesiapan ASN yang maksimal. Tanpa dukungan SDM yang memadai, kegiatan organisasi aparat pemerintahan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam usaha pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan serta keterampilan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Saudin (2021), untuk mencapai keberhasilan tersebut membutuhkan adanya ASN yang berkualitas. ASN yang berkualitas harus mempunyai

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam hal ini aparatur daerah harus memiliki pengetahuan, kualitas, dan pemahaman yang memadai tentang pengelolaan BMD tersebut. Panjaitan *et al.* (2022) menggambarkan bahwa kompetensi dalam organisasi publik sangat diperlukan terutama untuk menjawab tuntutan organisasi, dimana adanya perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang sangat kompleks dan dinamis serta ketidakpastian masa depan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kompetensi SDM menjadi syarat utama dalam kinerja. Tanpa kompetensi, pekerjaan tidak akan dapat diselesaikan secara baik. Terutama aparatur pelayanan publik yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Kompetensi kinerja menjadi aspek yang paling berpengaruh terhadap kinerja yang dilakukan. Rahman (2017) bahwa mengukur kinerja pegawai menggunakan indikator kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, kemandirian, efektifitas dan komitmen kerja.

Sementara menurut Darno (2012) mendefenisikan kualitas sumber daya manusia sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya.

Juniartha & Sugiarto (2020) menyimpulkan bahwa proses manajemen dipengaruhi oleh siklus hidup aset, strategi SDM, teknologi informasi dan sumber daya, dan monitoring, integritas, dan transparansi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2020) bahwa pemberdayaan dan pemanfaatan SDM dengan baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan aset daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan SKPD/ UKPD. Kemudian, Güngör Göksu (2023) menambahkan bahwa dalam pekerjaan khususnya kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual lebih dominan dibandingkan pada kemampuan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Darno (2012) juga menemukan bukti adanya pengaruh positif variabel kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna. Begitu pula dengan hal senada yang diungkapkan oleh Tulungen (2014) bahwa tenaga kualifikasi yang berkompeten dan berpengalaman dalam rangka pengadaan barang dan jasa mempengaruhi pengelolaan manajemen aset di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Sumber Daya yang juga penting untuk mendukung keberhasilan implementasi pengelolaan BMD menurut Teori Implementasi Kebijakan Publik (Edward III, 1980) adalah fasilitas dalam bentuk pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi ini digunakan tidak hanya mengubah data menjadi informasi tapi juga digunakan untuk menyebarkan informasi

kepada setiap pengguna yang dituju, informasi tersebut dapat berupa informasi keuangan maupun non keuangan. Tujuan perusahaan atau organisasi menggunakan teknologi informasi antara lain untuk mempercepat menemukan solusi, menciptakan kreativitas, efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan.

Yusuf (2013) menyatakan bahwa kesulitan yang dirasakan oleh pemerintah daerah dalam membuat neraca awal adalah mengumpulkan data aset dan pencatatan aset pada SKPD serta penilaian aset. Hal ini terjadi karena data aset umumnya tidak tercatat dengan baik ketika diperoleh atau ketika dilakukan pembelian maupun ketika terjadi mutasi atau perubahan-perubahan aset. Sehingga pengelolaan barang daerah yang jumlahnya sangat besar dan bervariasi ini dibutuhkan sistem informasi manajemen barang daerah. Melalui sistem ini diharapkan pendataan barang daerah dapat dilakukan secara akurat dan *up to date*.

Penelitian tentang penggunaan teknologi informasi di pemerintahan daerah sudah dilakukan oleh Azhar, *et al.* (2013) menunjukkan bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset. Hasil penelitian Haryanto (2013) dan Tabita (2021) juga membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan aset daerah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Peny (2022) yang menyatakan sistem informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan BMN. Sedangkan Darno (2012) juga membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna. Namun demikian hasil penelitian dari

(Astini, 2018) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana sistem informasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas manajemen aset tetap.

Menciptakan ASN yang berkualitas, dibutuhkan suatu dorongan yang kuat dari seorang pimpinan maupun dari ASN itu sendiri. Dorongan tersebut dapat berupa pemberian motivasi kepada ASN, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Hal ini didukung pula oleh hasil penelitian Peny (2022) yang menyatakan kompetensi pegawai dan komitmen organisasi berpengaruh kecil terhadap kualitas pengelolaan BMN. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi merupakan faktor yang paling kritis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BMN. Namun, kompetensi personel dan komitmen organisasi tidak begitu penting.

Penelitian ini menggunakan komitmen pimpinan sebagai variabel mediasi. Hal ini berlandaskan pada Teori *Stewardship* (Donaldson & Davis, 1991) menggunakan pendekatan *governance* atas dasar psikologi dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi manajemen sebagai *stewards* (pelayan) dapat termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal* dan organisasi. Pertimbangan faktor psikologi dilakukan pada saat analisis variabel kemampuan manajemen berupa motivasi pimpinan pemda dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sebagai bentuk tata kelola yang mendukung keberhasilan organisasi.

Simamora dan Halim (2012) dan Murdianah (2022) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran diantaranya adalah sumber daya manusia, bukti

kepemilikan aset, penilaian aset, komitmen pimpinan. Hasil Penelitian Belo *et al.* (2018) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan Barang Milik daerah dengan variabel Komitmen Pimpinan sebagai variabel moderasi dengan hasil penelitian Komitmen Pimpinan tidak mampu memoderasi kualitas aparatur daerah terhadap kualitas pengelolaan BMD tetapi Komitmen Pimpinan mampu memoderasi variabel sistem Informasi Manajemen terhadap kualitas pengelolaan BMD.

Pada penelitian Tabita (2021) juga menggunakan variabel Komitmen Pimpinan sebagai variabel moderasi dalam penelitiannya yang dilaksanakan pada pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efek moderasi atas komitmen pimpinan ini tidak memberikan pengaruh signifikan pada sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Tanah Toraja. Sementara efek moderasi komitmen pimpinan memberikan pengaruh signifikan pada sistem informasi terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Tanah Toraja.

Sementara hasil penelitian Yuliana *et al.* (2021) menyatakan bahwa kualitas aparatur berpengaruh terhadap efektivitas manajemen aset tetap, regulasi berpengaruh terhadap efektivitas manajemen aset tetap, sistem informasi manajemen berpengaruh terhadap efektivitas manajemen aset tetap, sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap efektivitas manajemen aset tetap, komitmen pimpinan memoderasi pengaruh kualitas aparatur terhadap efektivitas manajemen aset tetap, komitmen pimpinan memoderasi pengaruh regulasi terhadap efektivitas manajemen

aset tetap, komitmen pimpinan memoderasi pengaruh sistem informasi manajemen terhadap efektivitas manajemen aset tetap, komitmen pimpinan memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap efektivitas manajemen aset tetap.

Adanya ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu terkait hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas teknologi informasi serta untuk membuktikan komitmen pimpinan dalam memperkuat hubungan antar kedua variabel tersebut terhadap efektivitas pengelolaan BMD mendorong penelitian ini untuk melakukan penelitian lanjutan khususnya pada Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Sehingga, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “*Efek Moderasi Komitmen Pimpinan pada Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Pulau Taliabu*”.

1.2. Rumusan Masalah

Tingginya permasalahan pengelolaan aset daerah yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan khususnya pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pulau Taliabu yang belum optimal, maka penelitian ini dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan efektivitas pengelolaan aset daerah. Kompetensi SDM, kualitas sistem informasi, dan komitmen pimpinan dijadikan sebagai prediktor yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pulau Taliabu.

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu

seperti materi dan uang tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007). Teori *Stewardship* dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, melaksanakan pengelolaan BMD yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Menurut teori Implementasi Kebijakan Publik (*Edward III, 1980*), terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implelementasi suatu kebijakan dan salah satu diantaranya adalah sumber daya. Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia, fasilitas, informasi, dan wewenang. Penelitian yang telah dilakukan oleh Saudin (2021) dan Panjaitan *et al.* (2022) menggambarkan bahwa kompetensi dalam organisasi publik sangat diperlukan terutama untuk menjawab tuntutan organisasi dan menjadi syarat utama dalam pencapaian kinerja.

Kesulitan pemerintah daerah dalam membuat neraca awal adalah mengumpulkan data aset dan pencatatan aset pada SKPD serta penilaian aset. Hal ini terjadi karena data aset umumnya tidak tercatat dengan baik ketika diperoleh atau ketika dilakukan pembelian maupun ketika terjadi mutasi atau perubahan-perubahan aset. Sehingga dibutuhkan sistem informasi manajemen barang daerah dalam pengelolaan barang daerah yang jumlahnya sangat besar dan bervariasi ini. Melalui sistem ini diharapkan pendataan barang daerah dapat dilakukan secara akurat dan

up to date. Tabita (2021) juga membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan aset daerah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Peny (2022) yang menyatakan sistem informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan BMN. Namun Juniartha & Sugiarto Asana (2020) menemukan bahwa implemementasi sistem informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Murdianah (2022) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran diantaranya adalah sumber daya manusia, bukti kepemilikan aset, penilaian aset, komitmen pimpinan. Menciptakan ASN yang berkualitas, dibutuhkan suatu dorongan yang kuat dari seorang pimpinan maupun dari ASN itu sendiri. Dorongan tersebut dapat berupa pemberian motivasi kepada ASN, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Yuliana *et al.* (2021) dan Tabita (2021) menemukan komitmen pimpinan memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan BMD di Kabupaten Pulau Taliabu?
2. Apakah kualitas sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan BMD di Kabupaten Pulau Taliabu?

3. Apakah komitmen pimpinan memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap efektivitas pengelolaan BMD di Kabupaten Pulau Taliabu?
4. Apakah komitmen pimpinan memoderasi pengaruh kualitas sistem informasi terhadap efektivitas pengelolaan BMD di Kabupaten Pulau Taliabu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap efektivitas pengelolaan BMD di Kabupaten Pulau Taliabu.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kualitas sistem informasi terhadap efektivitas pengelolaan BMD di Kabupaten Pulau Taliabu.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis peran moderasi komitmen pimpinan pada pengaruh kompetensi SDM terhadap efektivitas pengelolaan BMD di Kabupaten Pulau Taliabu.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis peran moderasi komitmen pimpinan pada pengaruh kualitas sistem informasi terhadap efektivitas pengelolaan BMD di Kabupaten Pulau Taliabu.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoretis, praktis dan kebijakan terutama bagi akademisi dan pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan asset daerah. Selain itu, akademisi juga dapat mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan barang milik daerah yang diperoleh dari studi empiris dan menjadi langkah perantara bagi penelitian-penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi untuk memberikan bahan pertimbangan dalam menetapkan strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah suatu instansi pemerintahan.

1.4.3. Kegunaan Kebijakan

Bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan

pengelolaan asset daerahnya dan mewujudkan terciptanya *good government governance*.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Pulau Taliabu. Fokus penelitian pada pengelolaan BMD termasuk Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang lingkup Pemda di Kabupaten Pulau Taliabu.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan agar informasi dapat disampaikan dengan urutan logis dan berdasarkan aturan. Sistematika penulisan disajikan ke dalam tujuh bab sebagai berikut.

Bab pertama adalah bab pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah bab tinjauan pustaka. Bab ini memuat uraian sistematik tentang teori, konsep, pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

Bab ketiga adalah bab kerangka konseptual dan hipotesis. Bab ini berisi kajian teoretis dan empiris yang dirumuskan secara logis dan membentuk kerangka konseptual. Bab ini juga menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

Bab keempat adalah bab metode penelitian. Bab ini menguraikan metode dan langkah penelitian secara operasional yang mencakup rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

Bab kelima yaitu hasil penelitian yang berisikan analisis penelitian dari data yang diolah dan diuji. Hasil olah data tersebut kemudian diinterpretasikan dan dikaitkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan.

Bab keenam merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya, dan implikasi penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. *Stewardship theory*

Stewardship theory menurut Donaldson & Davis (1991) mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Teori *Stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan, sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital*

suppliers/principals) mempercayakan (amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (manajemen) yang lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah=*trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*.

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007). Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para penerima amanah (*steward*) termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pihak pemberi amanah (*principal*), selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Dengan kata lain hubungan yang terjadi antara prinsipal dan *steward* dalam hal ini rakyat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai *steward*, ialah hubungan yang terjalin karena adanya sifat dasar manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain.

Teori *Stewardship* sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan) dengan beberapa asumsi-asumsi dasar (*fundamental assumptions of Stewardship theory*). Beberapa pertimbangan

penggunaan *Stewardship theory* sehubungan dengan masalah penelitian ini:

1. Manajemen sebagai *stewards* (pelayan/penerima amanah/pengelola). *Stewardship theory* memandang bahwa manajemen organisasi sebagai “*stewards/penatalayanan*”, akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Penelitian ini membahas mengenai praktek pelaporan keuangan yang baik (berkualitas) termasuk pelaporan BMD. Pemerintah Daerah bertindak sebagai *stewards*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.
2. Pendekatan *governance* menggunakan *sosiologi* dan *psikologi*. Teori *Stewardship* menggunakan pendekatan *governance* atas dasar psikologi dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi manajemen sebagai *stewards* (pelayan) dapat termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal* dan organisasi. Implikasinya pada penelitian ini adalah Pemda memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan hanya untuk kepentingan ekonomi tetapi juga pertimbangan *sosiologis* maupun *psikologis* masyarakat guna mencapai *good governance*. Penelitian ini mengarah ke pendekatan

governance yaitu menghasilkan informasi laporan BMD yang berkualitas dengan mempertimbangkan faktor psikologi. Pertimbangan faktor psikologi dilakukan pada saat analisis variabel kemampuan manajemen berupa motivasi pimpinan pemda dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.

3. Model Manusia, berperilaku kolektif untuk kepentingan organisasi. *Model of man* pada *Stewardship theory* didasarkan pada *steward* (pelayan) yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok, bekerja sama dengan utilitas tinggi dan selalu bersedia untuk melayani. Terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan pro-organisational. *Steward* akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk bertindak kooperatif. Kepentingan antara *steward* dan *principal* tidak sama, tetapi *steward* tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. *Steward* berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada tindakan kooperatif dan tindakan tersebut dianggap tindakan rasional yang dapat diterima, misalnya dengan melakukan efisiensi biaya dan peningkatan kualitas/kinerja. Implikasi pada penelitian ini bahwa manajemen secara kolektif (bersama-sama) dan kooperatif mengarahkan seluruh kemampuan dan kualitasnya untuk menghasilkan informasi laporan keuangan Pemda yang berkualitas.

4. Motivasi pimpinan sejalan dengan tujuan *principals*. Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi para pimpinan tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi sehingga *steward (manajemen)* bertindak sesuai keinginan prinsipal. Konteks penelitian ini adalah pengelolaan BMD yang efektif, terdapat manajemen yang cenderung bersikap sesuai dengan perspektif teori pengelolaan (*Stewardship theory*). Seorang aktor yang rasional yang tidak dimotivasi oleh keinginan individualnya, tetapi lebih sebagai penerima amanah (penatalayanan) yang memiliki motif yang sejalan dengan tujuan prinsipal.
5. Kepentingan manajer-*principal* adalah konvergensi. Teori *Stewardship* mengasumsikan bahwa kepentingan manajer dan *principal* adalah konvergensi artinya keduanya mempunyai tujuan yang sama menuju satu titik yaitu untuk kepentingan organisasi. Kepentingan organisasi tercapai maka kepentingan individu juga terpenuhi. Penelitian ini menggunakan variabel kemampuan Sumber daya manusia dan komitmen pimpinan keduanya diasumsikan mempunyai tujuan yang sama dengan *principals* menuju satu titik yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik.
6. Struktur berupa fasilitasi dan pemberdayaan. Teori *Stewardship* menggunakan struktur yang memfasilitasi dan

memberdayakan. Penelitian ini menggunakan variabel Kualitas sistem informasi. Penggunaan variabel tersebut, diharapkan dapat memfasilitasi dan memberdayakan pengelolaan BMD menjadi efektif.

7. Hubungan *principals*-manajemen saling percaya. *Stewardship theory* dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Filosofis tersebut tersirat dalam hubungan fidusia antara *principals* dan manajemen. *Stewardship theory* memandang manajemen sebagai institusi yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan *principals* maupun organisasi.

Implikasi teori *Stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, melaksanakan pengelolaan BMD yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2.1.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward III (1980) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisiian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
2. Sumber daya. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
 - a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh

karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.

- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
 - c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
 - d. Fasilitas; Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
3. Disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III (1980) adalah:
- a. Pengangkatan birokrat;
 - b. Insentif

4. Struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya- sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dalam penelitian ini, variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemementasi suatu kebijakan dalam hal pengelolaan BMD adalah variabel sumber daya baik sumber daya manusia maupun fasilitas dalam bentuk sistem informasi dan struktur birokrasi.

2.1.3. Efektivitas Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah

Berbicara tentang efektivitas menurut Miller yakni seberapa jauh sistem sosial mencapai tujuannya (Tangkilisan, 2005). Adapun pengertian efektivitas menurut KBBI yakni sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas

dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan. Pengertian efektivitas menurut (Ekasari, 2020) yakni berhubungan dengan keluaran (*output*) dan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa efektivitas berbicara mengenai segala daya usaha yang dilakukan demi tercapainya sasaran atau tujuan yang diinginkan.

Adapun pengertian dari pengelolaan yaitu suatu kegiatan yang mana memerlukan pengawasan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan biasa juga disebut dengan manajemen yang mana harus mengikuti aturan yang menjadi ketetapan agar setiap tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pengertian pengelolaan menurut Terry (2006) dalam Tabita (2021) dianggap sama dengan manajemen yang mana dipahami pada kegiatan proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu dan seni demi mencapai tujuan yang dimaksud. Adapun pengertian pengelolaan atau manajemen menurut yakni proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan penguadalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Demikian bahwa dapat kita simpulkan pengelolaan atau manajemen memiliki pengertian yakni suatu kegiatan yang didalamnya terdapat proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan demi mencapai tujuan yang telah disepakati.

Selanjutnya pengertian dari aset barang milik daerah yakni salah satu alat penyelegaraan roda pemerintah guna mendukung pelayanan masyarakat/stakeholder (Suparman & Sangadji, 2018). Adapun menurut Mardiasmo dalam (Kalangi, Kalangi, & Warongan, 2017) mengatakan bahwa, secara umum, aset pemerintah daerah adalah semua bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah dan digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian dapat kita simpulkan bahwa aset barang milik daerah yakni segala bentuk aset atau kekayaan daerah yang mendukung terselenggaranya pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2004), prinsip dasar dari keberhasilan proses pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi tiga hal utama yaitu (1) perencanaan yang tepat; (2) pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif; dan (3) pengawasan (monitoring). Pengelolaan barang milik daerah adalah satu cara meningkatkan kinerja secara terus menerus pada setiap level perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan barang milik daerah dari suatu entitas.

Oktaviana (2010) dalam Tabita (2021) menyatakan bahwa secara umum, pengelolaan aset pemerintah daerah mencakup 4 (empat) kegiatan utama, yaitu: 1) Perencanaan yang mencakup: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penggunaan, 2) Penatausahaan yang mencakup: inventarisasi, penilaian, pembukuan dan pelaporan, 3) Peningkatan produktifitas yang

mencakup: pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan, 4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Berdasarkan keseluruhan defenisi di atas maka secara keseluruhan dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa efektivitas pengelolaan aset barang milik daerah yakni suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan terhadap kekayaan atau aset daerah dei terselenggaranya roda pemerintahan.

2.1.4. Komitmen Pimpinan

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam manajemen, karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu pada diri manusia, timbullah kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 telah diamanahkan bahwa tugas dan kewenangan sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan dengan memperkuat otonomi daerah. Era Otonomi daerah ini menuntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap aparatur negara, sehingga peran kepemimpinan sangat dibutuhkan. Harus diterima bahwa peranan kepemimpinan dalam organisasi sangat sentral dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian efektivitas kepemimpinan dari seorang pemimpin merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam keberhasilan kepemimpinan tersebut. Dalam perspektif administrasi, pimpinan atau manajer merupakan orang yang bertanggung jawab atas organisasi atau unit yang dipimpinnya. Tugas

manajer dapat digambarkan dalam kaitannya dengan berbagai peran atau serangkaian perilaku yang terorganisir yang diidentifikasi dengan suatu posisi (Mitzberg dalam Herminingsih, 2009). Mitzberg menjelaskan bahwa manajer dapat memainkan tiga peran melalui kewenangan dan statusnya di dalam melaksanakan tugas - tugas yang dipercayakan antara lain:

- a. Peran interpersonal. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat memainkan peran sebagai *forehead*, *leader*, dan *liaison* (penghubung).
- b. Peran informasional. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat memainkan perannya sebagai monitor, pemberi informasi dan sebagai *spokesperson*.
- c. Peran penagambil keputusan. Peran ini, manajer digambarkan sebagai *entrepreneur*, *disturbance handle* (penangkal masalah), *resources allocator* (pengalokasi sumber daya) dan *negotiator* (*negosiator*).

Deskripsi peran manajer yang dikemukakan di atas, akan membutuhkan sejumlah keahlian manajerial yang penting, mengembangkan hubungan kerja seajar, menjalankan negosiasi, memotivasi bawahan, menyelesaikan konflik, membangun jaringan informasi dan membayar informasi, membuat keputusan dalam kondisi ambiguitas yang ekstrim, dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Menurut Sopiah (2008) fungsi kepemimpinan terbagi menjadi:

- a. fungsi pemecahan masalah atau fungsi yang bertalian dengan tugas yaitu mencakup fungsi pemberian saran pemecahan, informasi, dan pendapat,
- b. fungsi sosial atau fungsi pembinaan kelompok meliputi segala sesuatu yang membantu kelompok beroperasi secara lebih lancar.

Menurut Simamora & Halim (2012), komitmen pimpinan diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut pengelolaan barang milik daerah. Hal-hal yang penting diperhatikan Kepala SKPD dalam pengelolaan barang milik daerah yang lebih baik, diantaranya adalah:

1. Tidak sering melakukan pergantian personal pengurus dan penyimpan barang.
2. Pengurus dan penyimpan barang harus bekerja 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan surat keputusan pengangkatan. Jika pergantian petugas pengelola barang diperlukan harus ada kaderisasi terlebih dahulu terhadap penggantinya.
3. Kepala SKPD memberikan perhatian serius bagi barang milik daerah yang dikelolanya secara profesional.
4. Tidak menomorduakan urusan pengelolaan barang milik daerah, karena posisi kepala SKPD selain sebagai pengguna anggaran juga sebagai pengguna barang yang bertanggungjawab terhadap barang milik daerah yang dikelolanya.

5. Kepala SKPD diperlukan bukan hanya menerima masukan tapi harus merealisasikan solusi penyelesaian masalah pengelolaan barang milik daerah.

Salah satu kriteria efektivitas kepemimpinan adalah kemampuan dalam pengambilan keputusan. Maksud dari kemampuan dalam mengambil keputusan tidak hanya diukur dengan ukuran kuantitatif, dalam arti jumlah keputusan yang diambil, tetapi jumlah keputusan yang diambil yang bersifat praktis, realistik dan dapat dilaksanakan serta memperlancar usaha pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, pimpinan juga berperan serta dalam proses pengelolaan keuangan yang lebih baik.

2.1.5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengertian kompetensi menurut Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural merupakan seorang pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien. Adapun menurut (Rifa'i, 2014) kompetensi merupakan kemampuan atau keahlian dalam membuat sesuatu bentuk atau pekerjaan sesuai dengan skill dan pengetahuan berdasarkan keilmuan yang dimiliki dari pendidikan formal maupun informal yang akan membentuk sikap profesional dalam bekerja. Selain itu menurut Mulyasa kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi,

menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian dan mempersepsi yang mengarah pada seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien (Fauzi, 2019). Demikian dapat kita simpulkan bahwa kompetensi merupakan pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugasnya secara efektif.

Adapun pengertian dari aparatur daerah yakni pegawai negeri yang bertugas di suatu daerah tertentu. Pegawai Negeri menurut UU Nomor 20 Tahun 2023 (jo. UU No. 5/2014, jo. UU No. 43 Tahun 1999) tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat 1, adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi aparatur daerah dapat kita artikan bahwa kemampuan, keahlian serta perilaku yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri dalam suatu daerah tertentu dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Spencer dan Spencer dalam (Hutapea & Thoha, 2008) kompetensi juga dibentuk oleh beberapa komponen yakni:

- a. Pengetahuan, informasi yang diketahui atau dimiliki seseorang
- b. Keterampilan, keampuan atau keahlian seseorang dalam suatu bidang

- c. Konsep Diri, sikap atau nilai seorang individu.
- d. Ciri Diri, karakter bawaan diri yang sifatnya konsisten.
- e. Motivasi, keinginan atau dorongan dalam menjalankan tugas

Kompetensi pengelola aset daerah dapat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah. Kompetensi seseorang akan terwujudnyatakan melalui kinerja yang ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh (Moehariono, 2009) bahwa kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Selanjutnya melalui kinerja seorang pengelola barang milik daerah dapat kita nilai seberapa efektifnya pengelolaan barang milik daerah.

2.1.6. Kualitas Sistem Informasi

Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem yang membantu dalam pengumpulan, pengolahan, serta analisis data yang akan kemudian disajikan dalam bentuk informasi yang bernilai dan mendukung dalam pengambilan keputusan sehingga berguna dalam fungsi operasi manajemen (Machmud, 2013).

Menurut Zuliatus dalam (Lengkey, Nangoi, & Wokas, 2019) SIMDA Keuangan dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen daerah merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh pihak pemerintah guna membantu dalam pengolahan, pengumpulan serta analisa data sehingga mendukung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi manajemen.

Adapun tujuan pengembangan aplikasi SIMDA menurut (Ole, 2014) yakni:

- 1) Menyediakan database tentang kondisi di daerah secara terpadu mulai dari aspek kepegawaian, aset daerah, keuangan hingga pelayanan public
- 2) Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan
- 3) Mempersiapkan aparat daerah untuk mampu menguasai dan mendayagunakan teknologi informasi
- 4) Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang efektif maka aplikasi SIMDA sangatlah membantu dalam pengolahan data secara akurat, cepat dan tepat. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Alfiani dalam (Hendri & NR, 2020) bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis dengan aplikasi teknologi yang telah dikembangkan yang mendukung tercapainya akuntabilitas bagi

Pemerintah Daerah baik ditingkat pelaporan SKPKD maupun ditingkat akuntansi SKPD.

2.2. Tinjauan Empiris

Berikut ini penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Peny (2022) dengan judul Peran Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Investigasi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara. Berdasarkan pada analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis. Menurut penelitian ini, sistem informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan BMN, sedangkan kompetensi pegawai dan komitmen organisasi berpengaruh kecil terhadap kualitas pengelolaan BMN. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi merupakan faktor yang paling kritis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BMN. Namun, kompetensi personel dan komitmen organisasi tidak begitu penting.
2. Yuliana *et al.* (2021) dengan judul Pengaruh Kualitas Aparatur, Regulasi, Sistem Informasi Manajemen, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Manajemen Aset Tetap di Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi
3. Tabita (2021) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Sistem Informasi Daerah terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Komitmen

Pimpinan sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian menyatakan bahwa sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah, demikian pula kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah. Sementara komitmen pimpinan memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah. Komitmen pimpinan memoderasi terhadap hubungan kualitas sistem informasi terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah, sedangkan komitmen pimpinan berpengaruh terhadap Efektivitas pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Toraja Utara.

4. Saudin (2021) dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai di kantor camat Bobong Kabupaten Pulau Taliabu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Bobong Kabupaten Pulau Taliabu.
5. Khoirun & Haryanto (2021) dengan judul analisis pengaruh kompetensi SDM dan peran audit internal terhadap KUALITAS LK SKPD dengan SPIP sebagai variabel *intervening* studi empiris sekretariat daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan peran audit

internal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas LK SKPD dan peran audit internal juga berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap SPIP dan peran audit internal berpengaruh positif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap kualitas LK SKPD yang dimediasi oleh SPIP. Namun SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap LK SKPD, kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap SPIP dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas LK SKPD yang dimediasi SPIP secara positif dan signifikan.

6. Juniartha & Sugiarto Asana (2020) dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penerapan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
7. Amerieska *et al.* (2018) dengan judul analisis faktor tentang efektivitas pengelolaan barang milik daerah di kota malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan peranan kepemimpinan secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Malang.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual

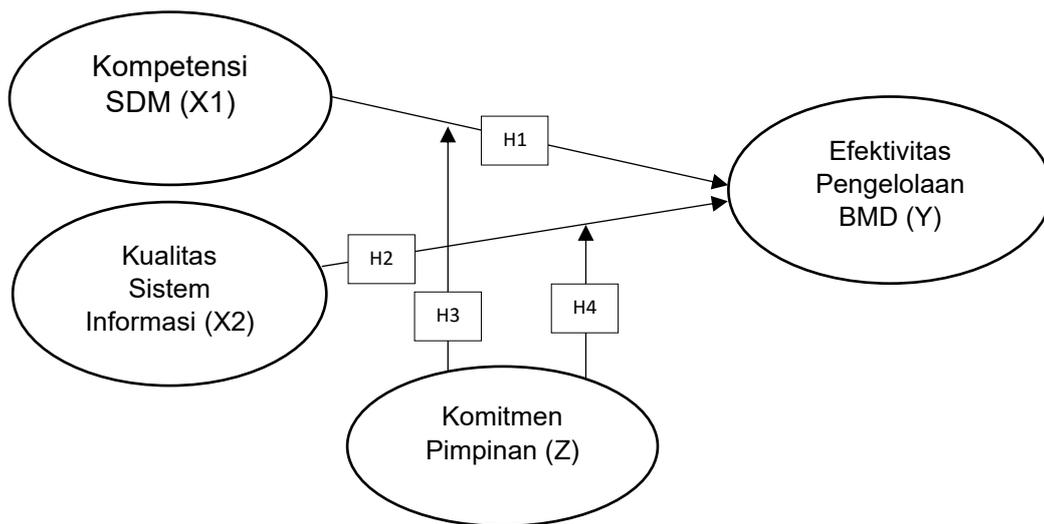
Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991) menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Stewardship theory* (Donaldson & Davis, 1991) mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

Teori implementasi kebijakan publik (Edward III, 1980) menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan implelementasi suatu kebijakan adalah variabel sumber daya baik sumber daya manusia, wewenang, dan fasilitas dalam bentuk sistem informasi dan struktur birokrasi. Kompetensi SDM yang baik dan kualitas sistem informasi serta didorong oleh wewenang dari komitmen pimpinan maka pengelolaan BMD akan lebih fektif.

Berdasarkan kerangka tinjauan teori dan tinjauan empiris maka peneliti merumuskan kerangka konseptual dengan menggunakan Kompetensi SDM dan Kualitas sistem informasi sebagai variable independen yang diprediksi mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan BMD serta adanya peran moderasi komitmen pimpinan yang mampu

memperkuat pengaruh Kompetensi SDM dan Kualitas sistem informasi terhadap efektivitas pengelolaan BMD.

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa kerangka konsep akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel independen dengan variabel dependen. Kerangka konseptual yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan gambar 3.1 di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini menguji pengaruh Kompetensi SDM (X1), Kualitas Sistem Informasi (X2), serta efek moderasi Komitmen Pimpinan (Z) terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD Kabupaten Pulau Taliabu (Y).

3.2. Hipotesis

Stewardship theory menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Stewardship theory* mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat

antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen (Donaldson & Davis, 1991). Oleh karena itu, teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para penerima amanah (*steward*) termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pihak pemberi amanah (*principal*), selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Dengan kata lain hubungan yang terjadi antara prinsipal dan *steward* dalam hal ini rakyat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai *steward*, ialah hubungan yang terjalin karena adanya sifat dasar manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain.

Dalam teori implementasi kebijakan public menurut Edward III (1980) bahwa kebijakan public mempertimbangkan beberapa hal seperti komunikasi, sumber daya, diposisi, dan struktur birokrasi. Sehingga, keberhasilan implemementasi suatu kebijakan dalam hal pengelolaan BMD adalah variabel sumber daya baik sumber daya manusia maupun fasilitas dalam bentuk sistem informasi dan struktur birokrasi.

3.2.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Rifa'i (2014) kompetensi merupakan kemampuan atau keahlian dalam membuat sesuatu bentuk atau pekerjaan sesuai dengan skill dan pengetahuan berdasarkan keilmuan yang dimiliki dari

pendidikan formal maupun informal yang akan membentuk sikap profesional dalam bekerja.

Pada asumsi-asumsi dasar (*fundamental assumptions of Stewardship theory*) salah satunya terkait model manusia, dimana *Model of man* pada *Stewardship theory* didasarkan pada *steward* (pelayan) yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok, bekerja sama dengan utilitas tinggi dan selalu bersedia untuk melayani. Terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan pro-organisational.

Dalam teori implementasi kebijakan publik (Edward III, 1980) dijelaskan bahwa sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Sehingga, kompetensi aparatur daerah dapat kita artikan bahwa kemampuan, keahlian serta perilaku yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri dalam suatu daerah tertentu dalam mencapai tujuan tertentu

Tabita (2021) menyatakan bahwa kualitas aparatur daerah adalah suatu standar yang harus dicapai oleh aparatur daerah dalam hal ini pejabat/ pegawai yang terlibat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah untuk melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah secara profesional, efektif, dan efisien. Seharusnya dengan adanya aparatur yang berkualitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah maka akan menghasilkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih baik.

Haryanto (2013) memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan aset daerah. Darno (2012) juga dapat membuktikan bahwa Kemampuan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna. Sementara menurut Tabita (2021) menyatakan bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah pada Kabupaten Toraja Utara. Adapun hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa:

H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD

3.2.2. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang efektif maka aplikasi SIMDA sangatlah membantu dalam pengolahan data secara akurat, cepat dan tepat. Alfiani dalam (Hendri & NR, 2020) bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis dengan aplikasi teknologi yang telah dikembangkan yang mendukung tercapainya akuntabilitas bagi Pemerintah Daerah baik ditingkat pelaporan SKPKD maupun ditingkat akuntansi SKPD.

Dalam teori implementasi kebijakan publik (Edward III, 1980) dijelaskan bahwa Fasilitas merupakan variabel penting keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementor mungkin memiliki staf yang

mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Teori *Stewardship* menggunakan struktur yang memfasilitasi dan memberdayakan. Penelitian ini menggunakan variabel Kualitas sistem informasi. Penggunaan variabel tersebut, diharapkan dapat memfasilitasi dan memberdayakan pengelolaan BMD menjadi efektif.

Sistem informasi adalah salah satu bentuk sarana dan prasarana yang digunakan dalam manajemen Barang Milik Daerah, yang merupakan sebuah rangkaian/ proses formal dalam pengelolaan BMD sesuai prosedur dimana data BMD dikelompokkan, diproses, dan dituangkan dalam laporan BMD. Penggunaan SIMDA-BMD seharusnya bisa meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah karena proses pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah bisa dilakukan secara komputerisasi dan terintegrasi.

Hasil penelitian Tabita (2021) menyatakan bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah pada Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian Azhar *et al.* (2013) menunjukkan bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset.

Haryanto (2013) juga membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan aset daerah. Sedangkan Darno (2012) juga membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna. Adapun hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa:

H2: Kualitas Sistem Informasi berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD

3.2.3. Komitmen Pimpinan sebagai pemoderasi hubungan antara Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 telah diamanahkan bahwa tugas dan kewenangan sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan dengan memperkuat otonomi daerah. Era Otonomi daerah ini menuntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap aparatur negara, sehingga peran kepemimpinan sangat dibutuhkan.

Pandangan *Stewardship theory* mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen (Donaldson & Davis, 1991).

Berdasarkan pada beberapa asumsi-asumsi dasar (*fundamental assumptions of Stewardship theory*) bahwa situasi para pimpinan tidak

termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi sehingga *steward* (manajemen) bertindak sesuai keinginan *prinsipal*.

Konteks penelitian ini adalah pengelolaan BMD yang efektif, terdapat manajemen yang cenderung bersikap sesuai dengan perspektif teori pengelolaan (*Stewardship theory*). Seorang aktor yang rasional yang tidak dimotivasi oleh keinginan individualnya, tetapi lebih sebagai penerima amanah (*penatalayanan*) yang memiliki motif yang sejalan dengan tujuan *prinsipal*.

Sementara, teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III (1980) berdasarkan dua variabel pengukur keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan jika dikaitkan dengan pengelolaan BMD adalah variabel sumber daya baik sumber daya manusia maupun fasilitas dalam bentuk sistem informasi.

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam manajemen karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu pada diri manusia, timbullah kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin (Tabita, 2021). Harus diterima bahwa peranan kepemimpinan dalam organisasi sangat sentral dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian efektivitas kepemimpinan dari seorang pemimpin merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam keberhasilan kepemimpinan tersebut.

Efek moderasi akan komitmen pimpinan juga pernah digunakan dalam penelitian Tabita (2021) yang menjadi salah satu acuan penelitian ini menggunakan efek moderasi yang digunakan dimana penelitian tersebut dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. Dalam hasil penelitian Tabita (2021) menyatakan bahwa komitmen pimpinan belum mampu memoderasi pengaruh pada kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan BMD pada Kabupaten Toraja Utara, sementara efek moderasi akan komitmen pimpinan ini berlaku pada kualitas system informasi terhadap efektivitas pengelolaan BMD di Kabupaten Toraja Utara.

Dasar pelaksanaan penelitian ini juga didasari dari penelitian Yuliana *et al.* (2021) menyatakan bahwa komitmen pimpinan memoderasi pengaruh kualitas aparatur terhadap efektivitas manajemen aset tetap, komitmen pimpinan memoderasi pengaruh regulasi terhadap efektivitas manajemen aset tetap, komitmen pimpinan memoderasi pengaruh sistem informasi manajemen terhadap efektivitas manajemen aset tetap, komitmen pimpinan memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap efektivitas manajemen aset tetap.

Atas dasar pernyataan diatas mengindikasikan bahwa efek dari komitmen pimpinan dalam membatu keberhasilan dalam pengelolaan BDM suatu daerah menjadi salah satu pengukur dalam proses pencapaiannya. Komitmen pimpinan ini dapat memberkan efek memperkuat dan/atau memperlemah hubungan dari kompetensi dari

individu atau SDM yang dimiliki dalam lingkup pemerintahan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa:

H3: Komitmen Pimpinan memoderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD

H4: Komitmen Pimpinan memoderasi pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD